

JURNAL MERPATI

Media Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pos Indonesia

<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/merpati>

PENERAPAN DAN PELATIHAN SID DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI KABUPATEN BANDUNG BARAT KECAMATAN PAROMPONNG JAWA BARAT

Nisa Hanum Harani¹, Roni Habibi², Iwan Setiawan³

Prodi D4 Teknik Informatika, Politeknik Pos Indonesia

[1nisahanum@poltekpos.ac.id](mailto:nisahanum@poltekpos.ac.id), [2ronihabibi@poltekpos.ac.id](mailto:ronihabibi@poltekpos.ac.id), [3iwan.setiawan@poltekpos.ac.id](mailto:iwan.setiawan@poltekpos.ac.id)

ABSTRAK

Pada zaman yang sangat modern ini masyarakat dihimbau untuk mengetahui dan mengerti perkembangan tentang pentingnya teknologi di kehidupan. Teknologi memberikan kemudahan untuk membantu setiap kegiatan manusia baik dunia akademik, pembangunan dan lain sebagainya terutama di bidang pemerintahan (*E-Government*). *E-Government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Suatu penyampaian informasi menggunakan sebuah sistem berbasis web akan lebih membantu bila menerapkan *E-Government* ini pada Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Pada saat ini Desa Cihanjuang, Bandung Barat masih menggunakan sistem manual yang pada akhirnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap saat, sehingga banyak sekali informasi yang tidak diketahui. Untuk meningkatkan kualitas suatu layanan data dan informasi, sebuah sistem *website* sangatlah dibutuhkan. Mengacu pada hal tersebut, maka diharapkan Desa Cihanjuang agar menggunakan sistem informasi berbasis Web dengan tujuan agar dapat mempublikasikan ke masyarakat luas serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap saat hanya dengan menggunakan *device* yang sudah terkoneksi oleh internet.

Kata Kunci: E-Government, Website, Sistem informasi, Komunikasi

1. PENDAHULUAN

Program *E-Government* hadir untuk membantu pemerintah desa khususnya Desa Cihanjuang agar memiliki sistem informasi desa mereka sendiri yang telah terkomputerisasi. *E-Government* menjadi suatu sistem yang sangat banyak digunakan sekarang ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dengan desa Cihanjuang, Bandung Barat yang perlu mengimplementasikan *E-Government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap masyarakatnya untuk mengetahui informasi-informasi yang ada. Menyadari akan besarnya manfaat *E-Government*, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan *E-Government* dalam

bentuk instruksi presiden nomor 3 tahun 2003. (Dalam Jurnal sistem *E-Government* Pada Desa Jatirejo, tahun 2013 oleh Fitria). Menyadari akan besarnya manfaat teknologi informasi yang berkembang saat ini maka diperlukannya sebuah sistem baru yang harus diterapkan di Desa Cihanjuang, Bandung Barat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pengaksesan informasi di desa Cihanjuang, Bandung Barat yang masih menggunakan sistem manual. Dengan akan diterapkannya sistem *E-Government* desa diharapkan membawa dampak yang cukup baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dari sisi pengguna misalnya, seorang pengguna dapat memperoleh informasi setiap saat, tanpa harus dibatasi jam kerja pegawai kelurahan ataupun berjalan menuju kantor kelurahan yang jaraknya beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan informasi. Dengan hal yang terjadi saat ini sesuai dan dengan ketentuan yang ada maka perlu untuk membangun sebuah sistem informasi dengan penerapan *E-Government* desa yang berbasis web. Sistem *E-Government* desa berbasis web memberikan pelayanan pengaksesan informasi yang ada di Desa Cihanjuang, Bandung Barat akan menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Dengan adanya sistem yang baru, maka dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas sumber daya yang ada di Desa Cihanjuang, Bandung Barat dikarenakan informasi yang lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat luas.

2. PERSOALAN MITRA

Hasil analisis situasi di lapangan, pada dasarnya desa yang menjadi mitra ini, memiliki permasalahan yang sama, kurangnya pemanfaatan penerapan sistem teknologi informasi, yang menjadi hambatan dalam menciptakan good corporate governance di lingkungan desa, hal ini dapat terlihat pada masalah yang dihadapi mitra berupa;

- 1) Belum terorganisasinya sistem pengolahan dan penyampaian informasi yang baik .
- 2) Sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual atau sistem yang belum lengkap, sehingga perlu terwujudnya sistem pengolahan data pemerintahan Desa yang lebih baik dan terintegrasi.
- 3) Permasalahan dihadapi mitra yang tidak menunjang dalam pencapaian dari prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi (*Transparency*) Akuntabilitas (*Accountability*) Responsibilitas (*Responsibility*) Independensi (*Independency*) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

3. SOLUSI DAN TARGET

Berdasarkan analisis situasi dan setelah mengkalsifikasikan permasalahan yang dihadapi mitra, maka berikut adalah solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan.

1. Permasalahan prioritas mitra dalam pengelolaan kegiatan desa selama ini, yaitu;
 - a. Belum terorganisasinya sistem pengolahan dan penyampaian informasi yang baik, maka solusi yang coba diberikan berupa pemberian materi terkait sistem informasi desa yang akan menanggulangi segala masalah yang ada di desa tersebut.
 - b. Sistem yang berjalan saat ini masih menggunakan sistem manual atau sistem yang belum lengkap, sehingga perlu terwujudnya sistem pengolahan data pemerintahan Desa yang lebih baik dan terintegrasi, maka solusi yang coba akan diberikan berupa penerapan sistem informasi desa dan akan dilakuan pelatihan dan pendampingan serta akan dibantu migrasi data kedalam sistem.
2. Keinginan dari pengurus desa untuk menjalankan prinsip-prinsip berupa;
 - a. Transparansi (*Transparency*),

- b. Akuntabilitas (*Accountability*),
- c. Responsibilitas (*Responsibility*),
- d. Independensi (*Independency*),
- e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Dapat dilakukan secara bertahap melalui pendampingan yang menyeluruh dari tim, diawali dengan penyuluhan terkait pembukuan akuntansi yang benar, didukung dengan penerapan sistim informasi desa diharapkan itu semua mengubah budaya organisasi yang telah ada, dengan pengolahan yang terencana maka pengawasan pun akan lebih mudah.

4. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM berupa sistemdesa bagi mitra ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, meliputi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan program ini meliputi :

Survei tempat pelaksanaan kegiatan.

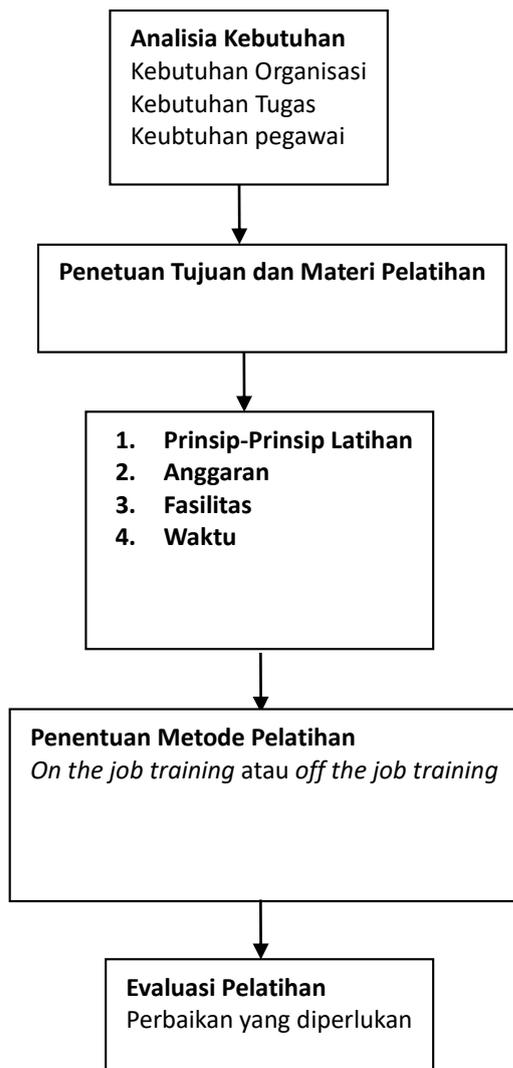
- a. Pembuatan proposal dan menyelesaikan administrasi perijinan pada mitra yang akan dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan.
- b. Pembuatan CD tutorial tentang sistem informasi desa.
- c. Mengadakan kerjasama dengan pakar sebagai pembicara pada kegiatan ini.
- d. Pembuatan modul oleh pembicara.
- e. Perbanyak modul oleh panitia.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sebanyak satu kali, Peserta ditempatkan dalam satu ruangan terdapat satu instruktur, yang terbagi kedalam beberapa sesi pelatihan. Sebelum memasuki ruangan, peserta dibekali dengan satu set ATK (Alat Tulis Kantor) untuk lebih memaksimalkan pelatihan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini peserta akan diberi modul yang disusun oleh instruktur. Kegiatan ini akan dibagi menjadi tiga tahap, tahap pertama yaitu pengisian materi oleh pembicara mengenai *sistem desa* dan penggunaannya sebagai media yang membantu kegiatan desa. Kemudian tahap yang kedua yaitu pelatihan pembukuan menggunakan *sistem desa*. Masing-masing peserta mempraktekannya dengan bimbingan langsung oleh pembicara dan dibantu oleh panitia. Lalu tahap ketiga adalah tahap pendampingan, yaitu memastikan peserta telah benar-benar mengerti untuk pengulangan baberapa transaksi yang dipandu oleh pembicara dan panitia. Kemudian tahap yang terakhir, yaitu tahap tanya jawab yang berkaitan dengan sistem desa sehingga pelatihan yang diberikan bisa mencapai hasil yang maksimal.

3. Tahap akhir

Tahap akhir terdiri dari pembuatan laporan hasil kegiatan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan.



Gambar 1. Alur Metode

5. HASIL YANG DICAPAI

5.1 Penentuan Data Dasar (*Look dan Think*)

Untuk menentukan seberapa besar target yang tercapai, maka pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan penentuan data dasar baik untuk kemampuan menggunakan sistem para peserta, kemampuan penguasaan Komputer khususnya dalam penggunaan sistem informasi desa yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan desa.

5.2 Kemampuan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi tidak serta merta dapat menyentuh semua kalangan yang ada dimasyarakat, hal ini disebabkan bahwa teknologi informasi memerlukan alat atau *Tools* sebagai media menyampaikan informasi dan kadang hal tersebut menyebabkan terhambatnya informasi sampai ke masyarakat, oleh sebab itu dalam kegiatan PKM ini dibutuhkan pemetaan terkait pengetahuan peserta dengan teknologi informasi dengan cara melakukan wawancara langsung berupa penyebaran angket kepada peserta pelatihan sehingga pelatihan ini akan menjadi sangat bermanfaat karena disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan yang dimiliki peserta pelatihan,

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab1 sampai dengan bab 5, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan Teknologi Informasi masyarakat desa Cihanjuang Kab. Bandung Barat sudah cukup baik, sehingga dapat menjadi dasar untuk dilakukannya pelatihan ini dalam rangka pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pelatihan untuk mengelola *sistem informasi desa* sebagai sarana mengenalkan e-government kepada perangkat desa Cihanjuang Kab. Bandung Barat dapat me-review kemampuan perangkat desa tentang teknologi informasi sudah dikuasai dan juga dapat meningkatkan kemampuannya.
3. Dengan mendapatkan pelatihan *sistem informasi desa* untuk e-government ini sebagai sarana memperkenalkan dunia informasi desa terhadap *perangkat desa Cihanjuang* Kab. Bandung Barat dan menjadi dasar untuk menumbuhkan jiwa Teknologi di kalangan pemerintahan desa.

6.2 SARAN

Saran dari hasil kegiatan PKM ini adalah bahwa pelatihan mengelola *sistem informasi desa* sebagai sarana mengenalkan e-government kepada perangkat desa didesa Cihanjuang Kab. Bandung Barat, sangat positif dan diharapkan terus berlanjut karena sangat baik untuk meeningkatkan jiwa teknologi dikalangan pemerintah desa, sehingga disarankan semua pihak terutama pihak desa untuk mempu bersaing di era industri 4.0.

7. REFERENSI

- Baridwan, Zaki .2004. *Intermediate Accounting*. Edisi 8, BPFE, Yogyakarta.
- Herman Soewardi .1995. *Filsafatdesa/Cooperativism*. Ikopin, Bandung.
- Horngen, Harrison, Robinson. 2003. *Akuntansi di Indonesia*, Jilid dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Komara, E. 2009. Prospek desa Sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Rakyat. (Online). <http://endangkomarasblog.blogspot.com>. Diakses 9 April 2014
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Soedjono, I. 1997. *Sosialisasi dan Implementasi Prinsip-Prinsip desa, desa Indonesia Menghadapi Abad ke-21*. Dekopin. Jakarta